

Evaluation of Modern Ritel Policy In Tembalang Semarang City

Ciciek Fitriana¹), Hartuti Purnaweni, dan Dewi Rostyaningsih

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email : fitriana.cicie9@gmail.com

Abstract

Modern market such as minimarket and modern shop are now growing fast in Tembalang regency, Semarang. This condition would probably give negative effects so evaluation of retail policy is needed in that area. The purpose of this research are to examine the impact of modern retail policy and to know the possible effort the can be conducted to reduce the modern retail effect in Tembalang regency. Qualitative methodology is used to describe the phenomena as the focus of the research. The source persons of this research are Semarang government officials, traditional merchants, and the society surround Tembalang regency.

The result of the research shows the development of modern market namely minimarket and modern shop in Tembalang regency is growing rapidly year by year. According to Trade and Industry Department of Semarang, in 2012 there were 39 modern shops in Tembalang regency. That data was considered incomplete considering to the fact since numbers of modern shops in several spots beside the street was not included within the list. The appearance of modern shop creates positive and negative effects. The positive effect, it can increase the PAD of Semarang as a city and ease the consumer. The negative effects are it can also depress traditional merchants profit and create resistance as well as social gap.

The suggestion of this research is hopefully, the government of Semarang would improve traditional market as new public service paradigm which upholds public importance along with the conduct of supervision in order to reduce the effect of the policy.

Keywords: evaluation of policy, modern ritel, Tembalang district, Semarang city.

EVALUASI KEBIJAKAN RITEL MODERN DI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Ciciek Fitriana¹⁾, Hartuti Purnaweni, dan Dewi Rostyaningsih

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email : fitriana.cicie9@gmail.com

Abstrak

Pasar modern jenis minimarket dan toko modern tumbuh pesat di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Keadaan ini dikhawatirkan akan berdampak negatif sehingga perlu dilakukan evaluasi kebijakan ritel modern di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengevaluasi dampak kebijakan ritel modern dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang. digunakan metodologi kualitatif yang bermaksud mendeskripsikan suatu fenomena yang menjadi fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang, pedagang tradisional, dan masyarakat Tembalang.

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan pasar modern jenis minimarket dan toko modern di Kecamatan Tembalang dari tahun ke tahun semakin pesat. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang tahun 2012 menunjukkan terdapat 39 toko modern di Kecamatan Tembalang. Data tersebut jumlahnya masih sedikit dari toko modern yang ada, sebab di titik ruas jalan tertentu terdapat toko modern namun tidak tercantum dalam daftar. Kehadiran pasar modern menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dapat meningkatkan PAD Kota Semarang, dan memudahkan konsumen. Negatifnya menurunkan omset pedagang tradisional, menimbulkan resistensi dan kesenjangan sosial.

Saran untuk penelitian ini agar Pemerintah Kota Semarang memperbaiki pasar tradisional sebagai wujud paradigma *New public service* yang mengedepankan kepentingan publik serta melakukan pengawasan sebagai upaya meminimalisir dampak kebijakan.

Kata kunci : Evaluasi kebijakan, ritel modern, Tembalang, Kota Semarang, pasar tradisional

1. PENDAHULUAN

Pasar tradisional merupakan asal mula berdirinya pasar di Indonesia dengan pengelolaan pasar yang masih sederhana. Namun, perkembangan pasar tradisional sekarang ini tidak menunjukkan suatu kemajuan yang baik dan sudah tidak menjadi *icon* berbelanja murah lagi yang menarik minat konsumen. Menurunnya eksistensi pasar tradisional tidak serta-merta karena persoalan pengelolaan pasar tradisional yang kurang baik, namun juga gaya hidup masyarakat yang semakin maju karena peningkatan pendapatan masyarakat membuat mereka menginginkan kemudahan dalam berbelanja yang lebih praktis, sehingga muncul pasar modern.

Sejarah pasar modern berawal dari fenomena *global retailing* (Reonaldo. 2011). Kebebasan ritel di Indonesia telah menghadirkan pasar modern sebagai pelayan kegiatan ekonomi masyarakat yang melayani jual beli barang dan jasa pembayaran.

Menurut Pandin (2009) perkembangan ritel di Indonesia hingga sekarang ini semakin pesat ditandai dengan banyaknya jenis pasar modern ternama dan dikenal masyarakat seperti Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket. Pertumbuhan ritel di suatu daerah dikarenakan pertumbuhan aktivitas di daerah tersebut seperti perkantoran, pendidikan, perumahan, dan perdagangan menjadi sasaran pertumbuhan ritel, sebagaimana halnya di Kota Semarang.

Kebebasan pendirian usaha ritel tersebar di berbagai daerah di kota ini. Di Kota Semarang persebaran pasar modern di seluruh kecamatan berbeda-beda sebagaimana data Bappeda Kota Semarang dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah dan Persebaran Pasar Modern Kota Semarang Tahun 2010

No	Kecamatan	Pasar Modern				Jumlah Pasar
		H	S	M	P	
1	Genuk	0	0	8	3	11
2	Gunung Pati	0	0	7	9	16
3	Pedurungan	1	3	44	51	99
4	Semarang Selatan	3	2	18	40	63
5	Semarang Tengah	4	3	11	51	69
6	Banyumanik	3	2	28	41	74
7	Candisari	0	1	8	19	28
8	Gayamsari	0	1	4	14	19
9	Mijen	0	0	8	11	19
10	Ngaliyan	0	2	14	29	45
11	Semarang Barat	0	4	23	34	61
12	Semarang Timur	0	1	11	17	29
13	Semarang Utara	0	0	10	20	30
14	Tembalang	0	0	29	80	109
15	Tugu	0	1	6	7	14
16	Gajah Mungkur	0	3	15	19	37
Jumlah Total		11	23	244	445	723

(bappeda.semarang.Pola_Perpasaran/publikasi.go.id/uploaded /.pdf)

Keterangan :

H : Hypermart

S : Supermarket

M : Minimarket

P : Pertokoan

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa persebaran pasar modern dari berbagai jenis di kota Semarang tahun 2010 paling banyak jumlahnya terdapat di Kecamatan Tembalang dengan persentase sebesar

15,07%, dibandingkan di seluruh kecamatan lain dengan persentase sekitar 1% - 13% saja. Dari analisis data persebaran perpasaran di Kota Semarang tahun 2010 dilihat dari kecamatan yang memiliki persentase pasar modern tertinggi maka pasar modern di Kecamatan Tembalang paling pesat pertumbuhannya. Oleh karena itu Kecamatan Tembalang dijadikan sebagai lokus dari penelitian ini. Di samping jumlah pasar modern di Kecamatan Tembalang paling banyak persentasenya, kecamatan ini juga masih menjadi sasaran investor untuk mendirikan pasar modern terutama jenis minimarket dan pertokoan modern lainnya.

Di samping jumlah pasar modern di Kecamatan Tembalang memiliki persentase yang besar, Kecamatan Tembalang harus diteliti lebih dalam untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu dengan penelitian ini ingin dievaluasi kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan ritel modern di kecamatan ini serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kebijakan yang ada.

2. KERANGKA TEORI

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan Publik yaitu mengukur keberhasilan kebijakan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan tersebut mengacu pada dua aspek: aspek proses dan hasil. Indiahono (2009).

Menurut Kusumanegara (2010) evaluasi kebijakan oleh Michael Borus ada tiga jenis yaitu evaluasi proses, evaluasi dampak, dan analisis strategis. Penelitian ini ingin menggunakan evaluasi dampak yang ingin mengetahui akibat dari suatu program.

Dimensi evaluasi kebijakan menurut Kusumanegara (2010) :

1. Dimensi waktu

Periode atau masa untuk mengamati dampak kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang dari waktu ke waktu.

2. Tipe-tipe dampak

a. Dampak pada sikap-sikap publik

Berkaitan dengan pandangan dan respon publik terhadap kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

b. Dampak pada kualitas kehidupan

Hal ini menyangkut dampak kebijakan pada keberlangsungan kehidupan sosial individu, kelompok, dan masyarakat.

c. Dampak ekonomi

Memfokuskan pada perubahan penghasilan pedagang tradisional, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang, dan pendapatan per kapita.

Pasar

Menurut William J. Stanton Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. (Swastha, 1979:5).

Pasar Tradisional

Pasar yang terdiri dari kios-kios atau gerai yang masih sederhana sistem pengelolannya, terdapat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. (Wikipedia).

Pasar modern

Menurut Pandin (2009) pasar modern adalah tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dimana penjualan dilakukan secara eceran dan dengan cara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir).

Ritel modern

Ritel modern merupakan pengembangan ritel tradisional yang jauh lebih maju dalam pengelolaannya yaitu dengan menerapkan sistem pengelolaan yang mandiri, harga yang tercantum sudah tetap dan barang yang diperdagangkan beragam serta gerai-gerai ritel modern dinamai dengan pasar modern. Hutabarat (2009)

Ijin Usaha

Adapun pengertian surat ijin usaha perdagangan (SIUP) menurut Kurniawan (2009) dalam artikelnya yang berjudul “*Surat Ijin Usaha Perdagangan*”. SIUP merupakan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dapat dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan diterbitkan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/Wilayah berdasarkan domisili perusahaan. Untuk melakukan usaha Toko Modern, wajib memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian Evaluasi Kebijakan Ritel Modern di Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial tertentu. Fokusnya adalah evaluasi kebijakan ritel modern. Adapun situs penelitian ini adalah Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, pedagang tradisional, serta masyarakat Kecamatan Tembalang.

Jenis data adalah data primer seperti data statistik maupun data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan, juga data sekunder yang bersumber dari data-data literatur, penelitian terdahulu, serta dokumen. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis, kemudian disajikan, dan pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diberikan informan. Kualitas atau keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi.

4. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini evaluasi dampak kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang dibahas melalui dimensi evaluasi kebijakan yaitu (1) Dimensi waktu; (2) Dimensi tipe-tipe dampak ; (a) Dampak pada sikap-sikap publik; (b) Dampak pada kualitas kehidupan; (c) Dampak pada ekonomi. Sehingga setelah mengetahui dampak yang ditimbulkan dapat mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kebijakan.

4.1. Dimensi waktu

Pesatnya pertumbuhan toko modern minimarket di Kecamatan Tembalang memang tidak dapat ditekan, laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut tidak terlepas dari peningkatan kepadatan penduduk di Kecamatan Tembalang seperti banyaknya kalangan mahasiswa dari Universitas Diponegoro (Undip) dan para pekerja yang membutuhkan tempat tinggal di Tembalang. Oleh karena mahasiswa yang kos jauh dari orangtua sehingga untuk memenuhi kebutuhan mereka lebih senang berbelanja di pasar modern yang praktis, sehingga ritel modern memiliki peluang besar untuk berkembang di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang daftar toko modern tahun 2012 di Kecamatan Tembalang terdapat 39 unit, namun observasi lapangan menemukan jumlah toko modern di Kecamatan Tembalang pada tahun 2014 sudah lebih dari 100 unit. Misalnya di Jalan Prof. Soedarto sebagai jalan utama saja terdapat tiga buah minimarket ternama dua diantaranya terletak bersebelahan yaitu Alfamart dan Indomaret, akan tetapi yang sudah terdaftar hanya Indomaret Undip. Kemudian di jalan Sirojudin juga terdapat tiga buah minimarket ternama dua diantaranya juga terletak bersebelahan dengan merek Alfamart dan Indomaret, namun yang sudah terdaftar hanya Indomaret Sirojudin.

Begitu pula toko modern yang lokasinya terletak di dalam kompleks pemukiman di Kecamatan Tembalang juga masih banyak belum terdaftar di

dalam data yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang.

Hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan toko modern di Kecamatan Tembalang terus bertambah dilihat jumlahnya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan jumlah pasar modern dari tahun ke tahun juga tidak lepas dari peran Pemerintah Kota Semarang yang mudah memberikan izin usaha perdagangan.

4.2. Dimensi tipe-tipe dampak

(a). Dampak pada sikap-sikap publik. Adapun sikap-sikap ditunjukkan publik atas kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah merupakan wujud perhatian masyarakat terhadap sesuatu yang terjadi.

Terdapat respon dukungan terhadap kehadiran pasar modern. Kebanyakan kalangan masyarakat menyetujui didirikannya toko modern di wilayah tempat tinggal mereka karena dapat membantu memenuhi kebutuhan penduduk. Terdapat kemampuan pendapatan per kapita untuk berbelanja sesuai dengan penghasilan masyarakat Tembalang untuk berbelanja di toko modern yang mayoritas adalah mahasiswa, yang menuntut hidup praktis dan efisien dalam berbelanja. Lokasi pasar modern yang semakin mudah dijangkau juga menjadi daya tarik pelanggan untuk berbelanja disana, dengan waktu fleksibel karena jam operasionalnya 24 jam.

Selain kehadirannya mendapatkan dukungan, keberadaan pasar modern di Kecamatan Tembalang juga menghadapi resistensi atau penolakan

dari beberapa kalangan. Resistensi adalah respon penolakan dari publik dalam menanggapi suatu kebijakan yang telah diimplementasikan oleh administrator sebagai bentuk reaksi masyarakat, dalam penelitian ini oleh penduduk Kecamatan Tembalang maupun Pemerintah Kota Semarang sebagaimana yang dituturkan oleh salah satu pedagang tradisional seperti berikut ini “*Saya menolak 100%*”.

Beberapa kalangan menolak adanya pendirian toko modern di wilayah mereka. Adanya penolakan yang timbul dari beberapa kalangan pedagang yang umumnya menolak kehadiran toko modern minimarket karena merasa akan mengancam keberadaan toko tradisional yang berada di sekitar pendirian lokasi minimarket tersebut. Dengan adanya toko modern secara otomatis akan mempengaruhi budaya berbelanja konsumen. Hal tersebut menyangkut gaya hidup masyarakat yang mengalami perubahan menuju ke arah modernisasi. Selain penolakan yang datang dari pedagang, beberapa masyarakat golongan menengah ke bawah juga merasa keberatan apabila berbelanja di pasar modern dengan harga jual barang yang lebih mahal.

(b). Dampak pada kualitas kehidupan. Kebijakan akan berdampak terhadap kualitas kehidupan setiap individu, kelompok-kelompok individu dan masyarakat secara keseluruhan yang seharusnya bersifat non-ekonomis seperti kesehatan dan pendidikan (Kusumanegara. 2010).

Dalam penelitian ini dianalisis dampak kebijakan ritel modern terhadap kualitas kehidupan bagi

pedagang tradisional, dan masyarakat Kecamatan Tembalang, yaitu dampak pada kesejahteraan sosial pedagang tradisional, dampak pada masa depan para pedagang tradisional berikutnya, dan kesenjangan sosial.

Dampak kualitas kehidupan yang disebabkan atas kemunculan pasar modern yang paling nyata yaitu dampak bagi kesejahteraan pedagang tradisional yang menurun, serta masa depan para pedagang tradisional melanjutkan hidupnya dengan adanya dampak kebijakan, dan kesenjangan yang terjadi karena minimnya mitra usaha yang terjadi antara pengusaha dengan pedagang tradisional yang menjadikan ketidakharmonisan dalam dunia usaha dan perdagangan. Banyak pedagang yang putus asa untuk melanjutkan usahanya, sehingga mereka lebih memilih untuk beralih profesi ataupun berganti usaha.

(c). Dampak ekonomi

Dampak ritel modern pada kehidupan ekonomi, memfokuskan perhatian pada penghasilan, nilai tambah, rasio *cost benefit*, GNP (Kusumanegara. 2010). Dalam penelitian ini dianalisis akibat ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ritel modern terhadap kelangsungan usaha, omset penjualan pedagang tradisional di Kecamatan Tembalang, yaitu dampak bagi perekonomian masyarakat, serta dampak bagi PAD Kota Semarang.

Dengan adanya pasar modern, maka Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini diuntungkan melalui kontribusi pasar modern untuk PAD Kota Semarang melalui perijinan dan pajak yang dibayarkan pasar modern dari

harga jual sebesar 10% sehingga meningkatkan PAD Kota Semarang sebagaimana yang disampaikan oleh Sekertaris Kecamatan Tembalang *“10% dari harga jual barang di pasar modern merupakan pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kota Semarang”*. Selain pajak yang didapat dari harga jual barang di pasar modern, Pemerintah Kota Semarang juga mendapat retribusi dari proses perijinan, iklan, dan reklame.

Namun, dengan harga jual barang yang lebih mahal maka konsumen dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk berbelanja. Selain itu preferensi harga jual barang tidak menentu karena di pasar modern sering terdapat harga promo ataupun potongan harga lainnya, sehingga menjadikan preferensi harga naik turun dan menyebabkan pedagang tradisional kalah bersaing untuk memberikan harga diskon. Dampak ekonomi yang paling dirasakan adalah penurunan omset penjualan dan pendapatan pedagang tradisional. Pedagang tradisional mengalami kerugian karena pelanggan mulai beralih berbelanja ke pasar modern, sehingga tidak jarang pedagang tradisional sepi pembeli, dan bahkan bangkrut seperti yang dikeluhkan oleh salahsatu pedagang tradisional *“omset penjualan saya menurun karena pelanggan semakin sedikit bahkan tidak jarang dalam sehari tidak laku sama sekali”*.

4.3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak kebijakan

(a). Bantuan kredit modal

Untuk menyelamatkan nasib para pedagang tradisional pemerintah telah

menawarkan bantuan kredit modal untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat pada beberapa pasar percontohan di tanah air, untuk memberikan kredit pinjaman kepada pelaku usaha mikro sebesar 20 juta. Untuk memudahkan proses pinjaman tersebut pemerintah pusat juga dapat memberikan jaminan sertifikat bagi pedagang agar kiosnya lebih diakui sehingga dapat kredit pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). (Kompas 14 Agustus 2014)

(b).Pemerintah memfasilitasi pasar tradisional

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang sebagai administrator kebijakan publik dalam hal ini yang mengimplementasikan kebijakan publik ritel modern di Kecamatan Tembalang diharuskan mengupayakan sebesar-besar manfaat untuk kepentingan publik. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah pusat yang bertekad mendorong daya saing pasar tradisional sehingga dapat berkembang bersama-sama dengan pasar modern melalui program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan di seluruh tanah air sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina dalam Kompas, 14 Agustus (2014) dengan judul *“Revitalisasi Pasar Berlanjut”*.

Revitalisasi pasar tradisional tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki kondisi fisik pasar seperti membangun sarana *wc*, lahan parkir lebih diperluas, atap pasar diperbaiki, penerangan, dan penataan *zona* penjualan. Selain memperbaiki kondisi fisik pasar, hal lain yang

dapat dilakukan adalah memperbaiki manajemen pasar dengan melakukan berbagai upaya dalam rangka memberi pendidikan dan pelatihan kepada para pedagang tradisional agar dapat mengelola usahanya dengan baik dan memiliki strategi dagang yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan peritel modern. Pendidikan dan pelatihan ini dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang melalui petugas teknis yang ditunjuk sehingga lebih mengerti kebutuhan dan keterbatasan yang dialami pedagang tradisional maupun pelaku usaha mikro lainnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Pesatnya laju pertumbuhan ritel modern di Kecamatan Tembalang semakin tinggi dapat dilihat dari jumlah pasar modern di Kecamatan Tembalang yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari peningkatan kepadatan penduduk di Kecamatan Tembalang yang mayoritas penghuninya adalah kalangan menengah ke atas seperti mahasiswa, dosen, karyawan yang bermukim di kawasan ini. Kecamatan Tembalang merupakan kawasan yang dijadikan pusat pertumbuhan baru Kota Semarang bagian atas menjadi daya tarik sendiri bagi investor untuk mendirikan pasar modern mengingat banyaknya kos-kosan dan beberapa kompleks perumahan baru yang juga membutuhkan ketersediaan sarana pelayanan kebutuhan ekonomi yang menunjang.

Pemerintah Kota Semarang sebagai administrator kebijakan yang memegang kekuasaan dalam hal ini memberi dukungan perkembangan

pasar modern yang ada di Kecamatan Tembalang dengan tujuan untuk kemajuan sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Semarang sehingga mudah menerbitkan ijin usaha perdagangan (SIUP). Padahal pemerintah dalam menjalankan peran sebagai administrator publik harus mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance* sehingga masyarakat sebagai sasaran kebijakan harus lebih diutamakan. Pemerintah Kota Semarang harus bertindak demokratis sebagaimana PRINSIP paradigma *New Public Service* (NPS) yang disampaikan oleh Denhardt (Yeremias. 2008) dapat diterapkan Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan ritel modern di Kecamatan Tembalang. Pemerintah Kota Semarang dinilai kurang melindungi pasar tradisional sebab membiarkan pasar modern terus berdiri tanpa memberdayakan para pedagang tradisional untuk berkembang bersama-sama.

Adapun dampak negatif dari kehadiran pasar modern adalah kesenjangan sosial antara peritel modern dengan pedagang tradisional karena kerugian yang dialami oleh para pedagang tradisional, selain itu konsumen yang harus mengeluarkan biaya berbelanja lebih karena terdapat pajak harga jual di pasar modern.

5.2. SARAN

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah mengacu pada beberapa permasalahan yang ada diantaranya :

1. Upaya untuk menekan laju pertumbuhan pasar modern
- (a). Pemerintah Kota Semarang sebagai administrator kebijakan publik harus mengawasi pelaksanaan

dengan berkoordinasi bersama-sama pemerintah di bawahnya dalam hal ini Kecamatan Tembalang sehingga kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan publik.

(b). Untuk membatasi laju pertumbuhan pasar modern di Kecamatan Tembalang berkurang, Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan fungsi pasar tradisional sebagai pemberi pelayanan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan pasar tradisional di Kecamatan Tembalang, sehingga dapat menarik minat publik kembali dan tidak bergantung pada pasar modern lagi.

2. Upaya untuk meminimalisir dampak kebijakan

(a). Upaya meminimalisir dampak pada sikap publik

Untuk mengatasi adanya resistensi atau penolakan yang timbul dari kalangan pedagang tradisional maupun masyarakat di sekitar areal yang akan didirikan pasar modern, sebaiknya sejak awal proses survey dan BAP dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat.

(b). Upaya meminimalisir dampak pada kualitas kehidupan.

Kesenjangan sosial yang ditimbulkan dari kehadiran pasar modern yaitu adanya kecemburuan sosial pedagang tradisional yang bersaing dengan peritel modern. Untuk itu harus terjalin kemitraan usaha antara peritel modern dengan pedagang tradisional melalui Pemerintah Kota Semarang yang menjembatani dengan mendaftarkan para peritel modern dengan pedagang tradisional untuk mengajak kerja sama dalam usaha perdagangan.

Apabila pedagang tradisional merasa tidak mampu bersaing dengan peritel modern, Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan bantuan kredit modal usaha kepada pedagang tradisional untuk mengembangkan usahanya ataupun untuk beralih usaha lainnya agar tetap bertahan hidup.

(c). Revitalisasi pasar tradisional.

Kehadiran pasar modern merupakan wujud keterpurukan pasar tradisional sebagai sarana pelayanan kebutuhan ekonomi yang kurang baik, sehingga untuk menarik kembali minat publik agar tidak bergantung pada pasar modern, Pemerintah Kota Semarang perlu memperbaiki kondisi fisik pasar, manajemen pasar, dan fasilitas penunjang lainnya yang lebih baik.

(a). Upaya untuk meminimalisir dampak ekonomi

Dampak ekonomi kehadiran ritel modern yang dialami para pedagang tradisional adalah penurunan omset penjualan pedagang tradisional, sehingga pendapatan berkurang. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang perlu memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada pedagang tradisional untuk manajemen dan memperbaiki tempat usahanya agar lebih baik dan menarik. Pemerintah Kota Semarang yang diuntungkan dengan peningkatan PAD Kota Semarang melalui proses perijinan dan pajak yang didapat dari pasar modern juga harus lebih bijak dalam menerbitkan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) agar tidak hanya mengutamakan kepentingan kapitalis.

DAFTAR PUSTAKA

Hutabarat, R. Marthin. 2009. *Dampak Kehadiran Pasar Modern Brastagi Supermarket terhadap Pasar Tradisional SEI Si Kambing di Kota Medan*". Agri bisnis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

Keban, T.Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

(<http://perusahaan.web.id/definisi/surat-izin-usaha-perdagangan-siup.html>).

http://bappeda.semarang.Pola_Perpasar-an/publikasi.go.id/uploaded /.pdf.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar>.

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/6548181/pasar_modern-libre.pdf.

Kompas. 14 Agustus 2014.

Srie Agustina. 14 Agustus 2014.. *Revitalisasi Pasar Berlanjut*. Kompas

Kurniawan. 2009. *Surat Izin Usaha Perdagangan*.

Pandin, L. Marina. 2009. "Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar Modern".

Reonaldo, MP. 2011. Makalah. *Bisnis Ritel Indonesia*. Yogyakarta : STIMIK AMIKOM

Swastha, Basu. 1979. *Azas-Azas Marketing*. Yogyakarta: Akademi Keuangan dan Bisnis (AKB)